OPEN ACCESS
Global Journal of Interdisciplinary Research and Innovation (GJIRI) | Vol. 1 No. 2 (2026)
E-ISSN:
Research

Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lokal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam

Anisa Cahyani Azra [1*], Sarpini [2]
[1-2] Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: [1)] anisaazra998@gmail.com

Abstract
The management of local natural resources is an important effort to support economic empowerment and strengthen the self-reliance of rural communities. However, the utilization of these resources needs to consider community participation, environmental sustainability, and the equitable distribution of economic benefits. This study aims to examine previous research on local natural resource management and analyze its relevance to the principles of Islamic economics. The study employs a descriptive quantitative approach through the synthesis of secondary data from 15 scientific articles published between 2018 and 2026. The data examined include community participation, changes in skills, income, and the management of local economic potential. The findings indicate that local natural resources can be utilized through various activities, including ecotourism development, organic farming, honeybee cultivation, marine product processing, and community-based business development. Several studies included in the review reported a 25% increase in the income of members of Joint Business Groups (Kelompok Usaha Bersama/KUB), as well as Village Original Revenue (Pendapatan Asli Desa/PADes) reaching IDR 14.2 billion in a village asset management initiative. These findings are further examined from the perspective of Islamic economics, particularly through the principles of khalifah fil ardh (human stewardship of the earth), mizan (balance), ta'awun (mutual cooperation), maslahah mursalah (public interest), and 'adl (justice). Based on this analysis, local natural resource management should be supported by community participation, transparent institutional governance, environmental conservation, and fair mechanisms for distributing economic benefits. Integrating Islamic economic principles can provide an ethical foundation for promoting inclusive and sustainable economic empowerment in rural communities.

Keywords: *Islamic Economics, Economic Empowerment, Local Natural Resource Management, Community Participation, Sustainability.*

Abstrak
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) lokal merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu mengenai pengelolaan SDA lokal serta menganalisis relevansinya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui sintesis data sekunder dari 15 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2018–2026. Data yang dikaji meliputi partisipasi masyarakat, perubahan keterampilan, pendapatan, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan SDA lokal mencakup berbagai kegiatan, antara lain pengembangan ekowisata, pertanian organik, budidaya lebah madu, pengolahan hasil laut, dan pengembangan usaha masyarakat. Sejumlah penelitian yang dirangkum melaporkan peningkatan pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama sebesar 25% serta capaian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp14,2 miliar pada pengelolaan aset desa yang diteliti. Temuan tersebut selanjutnya ditelaah melalui perspektif ekonomi Islam, khususnya prinsip khalifah fil ardh, mizan, ta'awun, maslahah mursalah, dan 'adl. Berdasarkan analisis tersebut, pengelolaan SDA lokal perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, kelembagaan yang transparan, pelestarian lingkungan, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil. Integrasi prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan etis bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan SDA Lokal, Partisipasi Masyarakat, Keberlanjutan.*

1. Pendahuluan

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di kawasan perdesaan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan yang memerlukan upaya pemberdayaan secara berkelanjutan dan

Copyright: © 2026 by the authors.
This is an open access article
distributed under the terms and conditions of the CC BY 4.0.

melibatkan masyarakat secara langsung (Hidayah et al., 2021). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beragam. Akan tetapi, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan kemampuan masyarakat, kurangnya akses terhadap permodalan, serta pola eksploitasi yang cenderung terpusat sehingga keterlibatan masyarakat lokal belum optimal (Hasanah et al., 2021). Kondisi ini mendorong berkembangnya pendekatan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM), yaitu model pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan potensi alam di wilayahnya (Putra et al., 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan potensi SDA lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengelolaan wisata mata air (Hidayah et al., 2021), konservasi daerah aliran sungai (DAS) (Putra et al., 2018), pengolahan hasil laut dan pengembangan usaha masyarakat pesisir (Septiandika et al., 2024), pertanian organik (Wiyono et al., 2023), budidaya lebah madu (Melani et al., 2022), serta pemanfaatan limbah perkebunan menjadi produk bernilai ekonomi (Anggraini et al., 2021). Berbagai bentuk pemanfaatan tersebut memperlihatkan peluang pengembangan usaha dan perluasan sumber penghidupan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian penelitian masih menggunakan perspektif manajemen publik, sosiologi lingkungan, dan ekonomi pembangunan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian teoretis (*theoretical gap*), khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam (Mansyur et al., 2025; Ramadhan, 2026).

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami hubungan antara manusia, lingkungan, dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh (Mansyur et al., 2025). Sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip *khalifah fil ardh* menekankan peran manusia dalam menjaga dan memelihara bumi (Hidayah et al., 2021), sedangkan *mizan* menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan (Mansyur et al., 2025). Selain itu, prinsip *ta'awun* mencerminkan pentingnya kerja sama dan solidaritas sosial dalam pengelolaan potensi lokal (Rossa et al., 2025), sementara prinsip *'adl* menekankan perlunya keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi di antara masyarakat (Ramadhan, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menyintesiskan hasil penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sumber daya alam lokal melalui pendekatan deskriptif, sekaligus menafsirkannya kembali menggunakan perspektif ekonomi Islam (*Islamic reframing*). Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola pengelolaan SDA berbasis masyarakat, menelaah potensi kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi, serta merumuskan rekomendasi tata



kelola sumber daya alam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Analisis terhadap dampak ekonomi akan disesuaikan dengan bukti yang tersedia dalam setiap penelitian, sehingga tidak menyimpulkan adanya peningkatan kesejahteraan secara umum apabila data pendukungnya belum memadai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang berlandaskan sintesis data sekunder terukur (Secondary Quantitative Descriptive Synthesis). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan merangkum berbagai indikator kuantitatif yang tersedia dalam sumber literatur sekunder. Proses penelitian dilakukan tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel serta tanpa mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung (Rossa et al., 2025; Ramadhan, 2026).

Data kuantitatif dalam penelitian ini dirangkum secara keseluruhan dari 15 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2018–2026 dan membahas pengelolaan sumber daya alam (SDA) lokal di berbagai wilayah perdesaan Indonesia. Data yang digunakan mencakup jumlah responden dari masing-masing penelitian, dengan cakupan sampel sekitar 100–300 responden pada beberapa studi. Sebagai contoh, penelitian Mansyur et al. (2025) melibatkan 300 responden di Sulawesi Selatan, sedangkan Tampubolon et al. (2020) menggunakan analisis regresi Ordinary Least Squares (OLS) terhadap 100 responden di Simalungun.

Variabel Pengelolaan SDA Lokal (X) ditentukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, nilai rata-rata peningkatan keterampilan dengan skala 0–100, serta persentase penggunaan pemasaran digital (Septiandika et al., 2024; Hasanah et al., 2021). Selanjutnya, variabel Pemberdayaan Ekonomi (Y) dinilai melalui persentase pertumbuhan pendapatan bulanan rumah tangga, jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rupiah, dan tingkat keberhasilan pembentukan kelompok usaha mikro (Hidayah et al., 2021; Septiandika et al., 2024). Sementara itu, variabel Perspektif Ekonomi Islam (Z) diukur menggunakan indikator partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan prinsip Khalifah/Mizan, tingkat keterlibatan dalam kerja sama kelembagaan yang mencerminkan nilai Ta'awun, serta tingkat keadilan dalam penyaluran modal sesuai prinsip syariah yang berlandaskan nilai 'Adl. Ketiga indikator tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (Tampubolon et al., 2020; Mansyur et al., 2025).

Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan teknik statistik deskriptif. Perhitungan persentase digunakan untuk mengetahui proporsi partisipasi masyarakat serta tingkat ketercapaian indikator program (Tampubolon et al., 2020; Hasanah et al., 2021). Selanjutnya, nilai rata-rata (mean) dimanfaatkan untuk menganalisis perubahan hasil pelatihan dengan



membandingkan capaian pre-test dan post-test (Septiandika et al., 2024). Untuk menentukan tingkat keberhasilan program, digunakan klasifikasi berdasarkan rentang persentase, yaitu 0–25% termasuk kategori sangat kurang, 26–50% kategori kurang, 51–70% kategori cukup baik, dan 71–100% kategori sangat baik (Hasanah et al., 2021).

3. Hasil dan Diskusi

Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat (CBNRM)

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis masyarakat merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan partisipasi warga dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat (Putra et al., 2018). Dalam pendekatan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM), terdapat enam komponen penting yang menjadi landasan pengelolaan, meliputi pemerataan hak dan manfaat (*equity*), penguatan kapasitas masyarakat (*empowerment*), penyelesaian perselisihan (*conflict resolution*), peningkatan pengetahuan dan kesadaran (*knowledge and awareness*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity protection*), serta penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable utilization*) (Putra et al., 2018).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan upaya terencana untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri (Anggraini et al., 2021). Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap penyadaran (awareness), yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Anggraini et al., 2021). Kedua, tahap pengkapasitasan (capacity building), yakni meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan, seperti pengolahan dan pengembangan variasi produk serta pengelolaan usaha (Anggraini et al., 2021; Septiandika et al., 2024). Ketiga, tahap pendayaan (empowerment and market access), yaitu memberikan ruang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha secara mandiri sekaligus memperluas jangkauan pemasaran melalui pemanfaatan media digital (Anggraini et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal

Keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) lokal tidak terlepas dari peran kelembagaan masyarakat dan kuatnya modal sosial yang berkembang di lingkungan setempat (Rossa et al., 2025; Tampubolon et al., 2020). Lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Usaha



Bersama (KUB), dan Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa (Hidayah et al., 2021; Septiandika et al., 2024; Melani et al., 2022). Di samping kelembagaan formal, nilai-nilai kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan membantu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat (Tampubolon et al., 2020; Supardi et al., 2026). Penerapan kearifan tersebut dapat dilihat melalui aturan adat Tanah Pusako di Minangkabau (Supardi et al., 2026), tradisi Mangase Taon dan sistem pengairan Raja Bondar di kawasan Danau Toba (Tampubolon et al., 2020), serta pemanfaatan hak ulayat oleh masyarakat di Teluk Youtefa, Papua (Kadir et al., 2025).

Pengelolaan SDA dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan potensi sumber daya alam didasarkan pada empat landasan teoretis utama. Pertama, Khalifah fil Ardh dan Amanah, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara bumi untuk menciptakan kemakmuran (imaratul ardh) sekaligus menghindari tindakan yang merusak lingkungan (la tufsidu fil ardh) (Hidayah et al., 2021; Mansyur et al., 2025). Kedua, Maslahah Mursalah, yaitu prinsip yang mengarahkan pemanfaatan sumber daya lokal agar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan mendukung terpenuhinya kebutuhan pokok (dharuriyyat) (Mansyur et al., 2025). Ketiga, Ta'awun dan Modal Sosial, yang menekankan pentingnya semangat gotong royong serta kolaborasi antarmasyarakat dan lembaga sebagai wujud nyata ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Rossa et al., 2025). Keempat, 'Adl dan Keuangan Sosial Islam, yang berorientasi pada pemerataan hasil pengelolaan SDA melalui mekanisme pembagian keuntungan secara adil (fair profit-sharing), serta pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif (ZISWAF produktif) maupun pengembangan BUMDes Syariah. Prinsip ini bertujuan agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih merata (Ramadhan, 2026; Hidayah et al., 2021).

Pemetaan Literatur Referensi Penelitian

Penelitian ini mengkaji 15 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2018–2026. Artikel-artikel tersebut membahas berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) lokal, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, pemanfaatan kearifan lokal, serta penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan potensi desa.



Setiap artikel dianalisis berdasarkan nama penulis, tahun terbit, judul penelitian, nama jurnal, fokus pembahasan, metode penelitian, dan hasil yang diperoleh. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui arah perkembangan penelitian sebelumnya sekaligus melihat hubungan antara pengelolaan sumber daya alam lokal dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemetaan tersebut, dapat diketahui berbagai pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan potensi alam. Hasil kajian juga menjadi dasar untuk memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat.

Deskripsi Statistik Kuantitatif Pengelolaan SDA Lokal dan Dampak Ekonomi

Keterlibatan Masyarakat dalam Mengelola Sektor SDA Lokal

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengkajian data kuantitatif dari beberapa wilayah perdesaan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan jenis potensi alam yang dikelola serta bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam berada pada rentang 40,0% hingga 71,0%. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga berbeda sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan (Tampubolon et al., 2020; Mansyur et al., 2025).

Keterlibatan tertinggi ditemukan pada kegiatan pelestarian lingkungan, yaitu sebesar 71,0%. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi modal sosial yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kegiatan konservasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Partisipasi tersebut penting karena keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kesediaan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab (Tampubolon et al., 2020).

Dampak Kenaikan Finansial dan Keterampilan Terukur

Program pemberdayaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal dapat memberikan hasil dalam bentuk peningkatan keterampilan, kemampuan berwirausaha, serta pendapatan masyarakat. Beberapa indikator yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut.



Berdasarkan Tabel 3, penelitian Septiandika et al. (2024) melaporkan adanya peningkatan pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp300.000 atau 25,0%. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal berpeluang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain pendapatan, peningkatan juga terlihat pada keterampilan produksi anggota KUB, yang berubah dari skor 65,0 menjadi 85,0. Sementara itu, indeks literasi wirausaha dalam penelitian Mansyur et al. (2025) meningkat dari 3,10 menjadi 4,30. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan kewirausahaan.

Penelitian Hidayah et al. (2021) juga melaporkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pengelolaan BUMDes Air Ponggok mencapai Rp14,2 miliar. Hasil ini memperlihatkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan aset lokal. Meskipun demikian, capaian dari setiap penelitian perlu dipahami sesuai dengan kondisi, metode, dan objek penelitian masing-masing.

Islamic Reframing: Konstruksi Tata Kelola SDA dalam Perspektif Ekonomi Islam

Temuan penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam lokal dapat ditelaah lebih lanjut menggunakan perspektif ekonomi Islam. Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konvensional, hasilnya dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab, kerja sama, kemaslahatan, dan keadilan (Mansyur et al., 2025; Hidayah et al., 2021).

Pertama, prinsip Khalifah fil Ardh dan Mizan berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi serta mempertahankan keseimbangan lingkungan. Pengembangan ekowisata yang disertai upaya konservasi, penghentian aktivitas penambangan batu ilegal di daerah aliran sungai Lubuk Langkap, penerapan pertanian organik di Seloliman, dan perbaikan vegetasi sebagai sumber pakan lebah di Banjaranyar merupakan contoh kegiatan yang relevan dengan prinsip tersebut (Putra et al., 2018; Wiyono et al., 2023; Melani et al., 2022). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai upaya menjaga kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kedua, prinsip Ta'awun dan Maslahah Mursalah menekankan pentingnya kerja sama dan penciptaan manfaat bagi masyarakat luas. Dukungan tokoh adat dan tokoh agama di kawasan Danau Toba yang dilaporkan mencapai 100%, tradisi gotong royong di Bugisan, serta kerja sama

melalui Kelompok Usaha Bersama di Probolinggo dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi dalam pengelolaan potensi lokal (Tampubolon et al., 2020; Rossa et al., 2025; Septiandika et al., 2024). Kerja sama tersebut dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kepentingan bersama. Dalam ekonomi Islam, kegiatan semacam ini sejalan dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan upaya mewujudkan kemaslahatan.

Ketiga, prinsip 'Adl dan keuangan sosial Islam berhubungan dengan upaya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat dan bagaimana modal usaha disalurkan. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok serta usulan pengembangan konsorsium Kampung Zakat di Papua dapat menjadi bahan kajian mengenai hubungan antara tata kelola kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi sumber daya (Hidayah et al., 2021; Ramadhan, 2026).

Pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif pendukung permodalan masyarakat. Apabila dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah, instrumen tersebut berpotensi membantu memperluas akses modal bagi kelompok usaha yang membutuhkan. Dengan demikian, penerapan nilai keadilan dalam pengelolaan SDA perlu diarahkan agar manfaat ekonomi tidak hanya terkumpul pada kelompok tertentu, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Secara keseluruhan, perspektif ekonomi Islam memberikan landasan etis bagi pengelolaan sumber daya alam lokal. Prinsip tanggung jawab lingkungan, kerja sama sosial, kemaslahatan, dan keadilan dapat digunakan untuk menilai apakah pemanfaatan potensi alam telah mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap 15 artikel ilmiah, pengelolaan potensi sumber daya alam lokal memiliki peluang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari peningkatan skor keterampilan produksi anggota KUB dari 65 menjadi 85, kenaikan pendapatan bulanan sebesar 25,0%, serta capaian PADes BUMDes Air Ponggok yang mencapai Rp14,2 miliar (Septiandika et al., 2024; Hidayah et al., 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi alam dapat dikembangkan melalui kegiatan produksi, kewirausahaan, pengelolaan aset desa, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Namun, hasil dari masing-masing penelitian tidak dapat disamaratakan karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah, bentuk program, dan karakteristik masyarakat yang diteliti.



Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan SDA perlu didasarkan pada prinsip Khalifah fil Ardh dan Mizan untuk menjaga kelestarian lingkungan, Ta'awun dan Maslahah Mursalah untuk memperkuat kerja sama serta kepentingan bersama, dan 'Adl untuk mendorong pembagian manfaat yang adil. Dukungan keuangan sosial Islam, termasuk ZISWAF produktif, juga dapat menjadi alternatif dalam memperluas akses permodalan masyarakat (Mansyur et al., 2025; Ramadhan, 2026).

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam lokal sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pemerataan manfaat. Integrasi prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dari 15 artikel ilmiah sebagai bahan analisis. Penelitian tidak melakukan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner atau wawancara langsung pada satu lokasi tertentu.

Perbedaan metode, karakteristik responden, wilayah penelitian, dan indikator yang digunakan dalam setiap artikel juga dapat memengaruhi hasil perbandingan. Oleh sebab itu, temuan yang diperoleh lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan hasil penelitian terdahulu, bukan sebagai bukti bahwa seluruh bentuk pengelolaan SDA lokal pasti menghasilkan dampak ekonomi yang sama.

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan data lapangan agar hubungan antara pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, dan penerapan prinsip ekonomi Islam dapat dianalisis secara lebih mendalam (Rossa et al., 2025).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia melalui pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pengembangan model BUMDes yang berlandaskan prinsip syariah juga dapat dipertimbangkan, terutama dalam penerapan mekanisme bagi hasil yang adil dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan ketentuan Islam (Hidayah et al., 2021).

Kedua, lembaga pengelola zakat dan filantropi Islam, seperti BAZNAS dan LAZ, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi. Kerja sama



pendanaan dan pengelolaan program dapat dikembangkan untuk memperluas jangkauan bantuan produktif, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Usulan konsorsium co-funding dan co-branding dapat dikaji lebih lanjut untuk mendukung koordinasi antarlembaga (Ramadhan, 2026).

Ketiga, peneliti berikutnya disarankan melakukan penelitian kuantitatif secara langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Penelitian dapat difokuskan pada satu lokasi BUMDes atau lembaga pengelola SDA berbasis syariah agar hubungan antara partisipasi masyarakat, tata kelola sumber daya, dan pemberdayaan ekonomi dapat diuji menggunakan analisis regresi atau Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) (Mansyur et al., 2025; Tampubolon et al., 2020).

Melalui langkah-langkah tersebut, pengelolaan sumber daya alam lokal diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata, memperkuat kemandirian masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Daftar Pustaka

Ali, M. M., Madani, A., Kafi, M. J., Wildan, A., Firdau, M. R., Muzakki, Laili, S., Ihsan, M., Umam, M. K., & Anam, F. (2025). Pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Candi Burung. *ABDISUCI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 11–15.

Anggraini, D., Purnama, N. I., & Harahap, S. H. (2021). Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui media sosial di Desa Timbang Lawan. *Abdi Sabha: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 46–52.

Awaluddin, M., Cahaya, A., Ashar, A. F., Abubakar, A., & HM, S. (2024). Strategies for empowering local communities through sustainable ecotourism development in Indonesia. *Pinisi Discretion Review*, 8(1), 195–200. https://doi.org/10.17645/si.v8i2.2587

Hasanah, B., Fuqoha, Mulyasih, R., & Sururi, A. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam di Desa Gunungsari Kabupaten Serang. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 3(2), 28–35. https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.728

Hidayah, S. N. M., Saliyo, & Qodarsasi, U. (2021). Islamic community development based on natural resource (NR) asset empowerment in Ponggok Village, Polanharjo, Klaten. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 165–186. http://dx.doi.org/10.24042/ijtimaiyya.v14i2.10215

Kadir, A., Hijjang, P., Sokoy, F., & Mano, M. B. (2025). Designing creative economy through community-based ecotourism: A case study of Youtefa Bay Park, Jayapura, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 9(2), 155–174. https://doi.org/10.21580/jsw.2025.9.2.27625

Mansyur, F., Hasanuddin, Malik, A., & Fitrayani. (2025). The role of economic education in optimizing local resource potential to increase community income. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 913–938. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art10

Melani, A., Hidayat, & Fahmi. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata kampung madu di Desa Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Agrimanex*, 2(2), 154–164.

Putra, D. A., Utama, S. P., & Mersyah, R. (2018). Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi Daerah Aliran Sungai Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 95–104.

Ramadhan, T. (2026). Dysfunction of Zakat Village governance in Papua: Fragmentation of collaboration and inequality of amil capacity. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 5(1), 667–692. https://doi.org/10.61860/jigp.v5i1.190

Rossa, P. A., Refalina, N. A., Azhar, A., & Mulasiwi, C. M. (2025). Kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal: Studi peran sistem ekonomi tradisional dalam kemandirian desa wisata. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 27(3), 30–37. http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927

Septiandika, V., Sucahyo, I., Rahmadhi, A., Dewi, R. C., Maksin, M., & Fadilah, S. N. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui kewirausahaan berbasis potensi lokal di Kota Probolinggo. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 67–75.

Supardi, Mirwati, Y., & Utami, R. (2026). Eksistensi tanah pusako dalam kontestasi politik agraria: Kajian kritis terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(4), 450–468. https://doi.org/10.31933/40tzk403

Tampubolon, A. N., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat lokal tepi Danau Toba Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 67–78. https://doi.org/10.36985/jrp.v2i2.595

Wiyono, S. H., Subianto, A., & Nuhman. (2023). Sustainable ecotourism development and community empowerment: A case study of the Center for Environmental Education in Seloliman Village, Indonesia. *Society*, 11(2), 310–328. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.528